

PENGARUH KUALITAS AUDIT, KINERJA KEUANGAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERUSAHAAN LQ 45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Dwi Yanti ¹⁾

¹⁾ Program Studi Manajemen Universitas Taman Siswa Palembang
Jl. Taman Siswa 261 20 Ilir I Ilir Timur I. Kota Palembang.
Email : dwi93@yahoo.com¹⁾

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of quality audit, financial perform, and firm size towards good corporate governance disclosure in company. The population in this study are companies LQ45 listed in Indonesia Stock Exchange 2011-2013. The technique of sampling uses non-random sampling method with purposive sampling method was obtained 21 companies which were the sample of the observations carried on as much as three years. The hypothesis has been tested by using multiple regression method with the SPSS version 17.0. The results show that the first hypothesis (H₁) states quality audit affect good corporate governance disclosure, rejected. The second hypothesis (H₂) states financial perform affect good corporate governance disclosure, rejected. The third hypothesis (H₃) states firm size affect good corporate governance disclosure, accepted.

Keywords : *Good Corporate Governance Disclosure, Quality Audit, Financial Perform, Firm Size.*

1. Pendahuluan

Munculnya konsep *good corporate governance* (GCG) yaitu pada tahun 1980-an, di Negara Amerika Serikat terjadi gejolak ekonomi yang luar biasa sehingga mengakibatkan banyak perusahaan melakukan restrukturisasi dengan tujuan untuk merebut kendali atas perusahaan lain. Tentu tindakan ini menimbulkan protes keras dari publik. Publik menilai bahwa dalam mengelola perusahaan, manajemen telah mengabaikan hak dan kepentingan para pemegang saham sebagai pemilik modal perusahaan. Kegiatan seperti *merger* dan akuisisi yang dilakukan para manajer tentu sudah mengakibatkan kerugian atas pemegang saham, dikarenakan pengambilan keputusan tanpa mempedulikan kepentingan para pemegang saham. Maka dari itu, untuk melindungi kepentingan para pemegang saham juga meningkatkan kembali kepercayaan dari publik, muncul sebuah konsep pemberdayaan Komisaris sebagai salah satu wacana penegakan *good corporate governance*.

Putranto menjelaskan bahwa konsep *good corporate governance* di Indonesia sering lahir ketika terjadinya krisis ekonomi (lebih dikenal dengan krisis moneter "krismon"). Dikarenakan buruknya tata kelola perusahaan serta pemerintahan di Indonesia maka semakin terpuruklah perekonomian Indonesia. Contohnya seperti sistem regulasi yang kurang mendukung, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, sampai praktik perbankan yang lemah. Krisis ini juga terbukti dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika [11].

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) telah mempublikasikan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* pada tahun 2006 yang memuat mengenai

peraturan, prinsip-prinsip, serta praktik dalam pengungkapan *corporate governance* yang harus atau dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia [7]. Selain KNKG, adapula Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan Nomor KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menyebutkan bahwa laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang telah dan akan dilaksanakan perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan berakhir [7]. Peraturan ini berlaku untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2006.

Terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi pengungkapan *good corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan. Beberapa peneliti telah menemukan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan *good corporate governance* antara lain, ukuran dewan direksi, kualitas audit, profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, kepemilikan dispersi, dan umur listing namun hasilnya belum konsisten. Dalam penelitian ini hanya akan memfokuskan pada faktor kualitas audit, kinerja perusahaan, dan ukuran perusahaan. Alasan dipilih 3 variabel tersebut karena kinerja keuangan dan ukuran perusahaan menjadi fokus perhatian banyak *stakeholder* serta kualitas audit memiliki peran penting dalam penerapan *good corporate governance* sehingga hal itu kemungkinan besar akan mempengaruhi pengungkapan *good corporate governance* perusahaan.

Dalam penelitian Putranto menyatakan bahwa ukuran perusahaan, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* [11]. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Natalia

yang tidak menemukan pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan [10]. Berbeda dengan penelitian Hormati bahwa kualitas audit dan ukuran perusahaan mempengaruhi positif terhadap penerapan *corporate governance* [9]. Hikmah juga menemukan pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dan tidak menemukan pengaruh profitabilitas [4]. Sedangkan penelitian yang dilakukan Kusumawati menemukan pengaruh kinerja keuangan yang diukur dengan profitabilitas terhadap luas pengungkapan informasi [6].

Peneliti memilih perusahaan LQ45 sebagai sampel karena LQ45 merupakan kumpulan saham teraktif yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sehingga investor menaruh perhatian lebih terhadap perusahaan-perusahaan ini dan untuk periode pengamatan yaitu dari tahun 2011-2013. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh kualitas audit, kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris kualitas audit, kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *good corporate governance*.

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan atau yang sering disebut dengan *agency theory* merupakan salah satu teori yang paling dekat apabila ingin memahami *good corporate governance*. *Agency theory* menekankan bahwa pemilik serta pemegang saham penting mempercayakan perusahaan mereka pada pihak ketiga (tenaga profesional). Dalam konteks *corporate governance*, teori agensi menggambarkan tanggung jawab para agen untuk mengelola dan mengembangkan perusahaan yang sudah dipercayakan kepada mereka dari para *principal* berdasarkan prinsip akuntabel dan transparansi.

Definisi yang bisa menggambarkan hubungan agen dengan pemegang saham (pemilik perusahaan) yaitu menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Adrian (2011) adalah

“a contract under which one or more persons (the principal/s) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involve delegating some decisions making authority to the agent. If both partners to the relationship are utility maximizers there us good reason to believe that the agent will not always act in the best interest of the principal.”

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa teori agensi merupakan sebuah hubungan kontrak yang dilakukan antara satu orang atau lebih terhadap pihak lain (*agent*) yang melakukan beberapa pekerjaan atas nama mereka (*principal*) yang melibatkan pendelegasian pengambilan keputusan kepada *agent*.

Teori Pemangku Kepentingan (Teori Stakeholders)

Menurut Freeman dalam Natalia pemangku kepentingan atau *stakeholder* adalah : “pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, kebijakan, dan operasi suatu organisasi. Pemangku kepentingan perusahaan dapat meliputi pelanggan, karyawan, pemegang saham, media, pemerintah, asosiasi profesi dan asosiasi perdagangan, aktivis sosial dan lingkungan, dan organisasi-organisasi non pemerintah” [10].

Perusahaan mempunyai hubungan yang kompleks dengan banyak pihak yaitu individu dan organisasi dalam masyarakat. Membangun hubungan positif dan saling menguntungkan antar batasan-batasan organisasional menjadi bagian yang semakin besar dari peran manajemen, karena manajemen sebagai pihak yang menjalankan perusahaan memiliki peran cukup andil dalam keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Penerapan *corporate governance* dalam perusahaan bukan hanya ditangan manajer, namun *stakeholder* sebagai pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan dapat mempengaruhi penerapan *corporate governance* yang baik dalam suatu perusahaan.

Good Corporate Governance

Menurut Cadbury Committee of United Kingdom *Corporate governance* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan *stakeholder* internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka, atau sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Good Corporate Governance* adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep GCG, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat), tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* [7].

Prinsip-prinsip Corporate Governance

Adapun secara umum menurut Sutiyoso, ada delapan asas atau prinsip *good corporate governance* [13], yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip Kepatuhan terhadap Aturan dan Hukum
Prinsip kepatuhan terhadap hukum yang dimaksud disini adalah ketaatan penyelenggaraan usaha atau bisnis terhadap hukum yang berlaku.
2. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan
Prinsip Transparansi adalah prinsip untuk bersedia melakukan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi material yang relevan mengenai jasa, produk, dan kebijakan dari institusi atau perusahaan

- kepada *stakeholder* dan *shareholder*, baik yang berhubungan dengan internal maupun eksternal.
3. Prinsip Akuntabilitas atau Tanggung Gugat (*accountability*)
Prinsip Akuntabilitas adalah prinsip bisnis beretika berkelanjutan yang berkaitan dengan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan atau institusi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien.
 4. Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*)
Prinsip Pertanggungjawaban adalah prinsip kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan atau institusi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selain itu prinsip ini juga bermakna pemenuhan kewajiban institusi atau perusahaan kepada semua pemangku kepentingan baik di internal maupun eksternal yang menjadi hak mereka.
 5. Prinsip Kewajaran (*fairness*)
Prinsip Kewajaran adalah prinsip pengelolaan perusahaan atau institusi yang didasarkan pada keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Prinsip Kejujuran (*honesty*)
Prinsip Kejujuran adalah prinsip kesesuaian antara perkataan, perbuatan dengan kondisi sebenarnya dan atau aturan yang ada menyangkut materi atau informasi yang relevan dalam kegiatan, praktek atau pengelolaan perusahaan atau institusi. Secara praktis adalah tidak adanya kebohongan antara perusahaan dengan semua *stakeholder* dan *shareholder* menyangkut materi dan informasi yang relevan bagi mereka.
 7. Prinsip Empati (*compassion*)
Prinsip Empati adalah prinsip perlakuan kepada *stakeholder* dan *shareholder* oleh sebuah perusahaan atau institusi sebagaimana mereka sendiri ingin diperlakukan dalam pengelolaan bisnis atau usaha. Secara operasional adalah bagaimana memperlakukan pihak lain seolah-olah memperlakukan diri sendiri.
 8. Prinsip Kemandirian (*independence*)
Prinsip kemandirian merupakan suatu keadaan dimana perusahaan atau institusi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Pengungkapan Good Corporate Governance dalam Laporan Tahunan

Menurut Effendi, ada empat tujuan utama keterbukaan informasi terutama pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan bagi perusahaan [2] adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan keterbukaan atau transparansi dalam pemberian informasi.
- b. Mendukung proses implementasi *good corporate governance*, termasuk pelaporan kepada pemangku kepentingan.

- c. Mengupayakan kualitas manajemen perusahaan yang lebih profesional.
- d. Bagi auditor eksternal (*auditor independen*) dituntut lebih memahami analisis strategi dan risiko perusahaan secara keseluruhan.

Menurut Rini menyatakan ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar [12], yaitu :

1. Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)
Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi berlaku. Pengungkapan ini bersifat wajib dan memaksa karena ada peraturan yang mengatur atas pengungkapan ini.
2. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)
Pengungkapan ini biasa dikatakan kebalikan dari pengungkapan wajib. Pengungkapan sukarela merupakan butir-butir yang harus dilakukan perusahaan tanpa ada peraturan yang mengaturnya.

Healy dan Palepa dalam Rini mengungkapkan bahwa meskipun semua perusahaan publik diwajibkan memenuhi pengungkapan minimum, perusahaan bisa saja menambahkan hal lain yang akan diungkapkan, pengungkapan sukarela secara lebih luas ini bisa meningkatkan kredibilitas perusahaan dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen [12].

Kelengkapan Pengungkapan Disclosure)

Na'im dan Rakhman (2000), mengatakan untuk mengukur kelengkapan pengungkapan dapat dinyatakan dalam bentuk indeks kelengkapan pengungkapan, perhitungan indeks kelengkapan pengungkapan dilakukan sebagai berikut :

1. Memberi skor untuk setiap item pengungkapan secara dikotomi, dimana jika suatu item diungkapkan diberi nilai satu dan jika tidak diungkapkan akan diberi nilai nol.
2. Skor yang diperoleh setiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan skor total.
3. Menghitung indeks kelengkapan pengungkapan dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan total skor yang diharapkan dapat diperoleh oleh perusahaan, dengan rumus.

$$\text{Indeks} = \frac{n}{k} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

n = jumlah butir pengungkapan yang terpenuhi

k = jumlah semua butir pengungkapan yang mungkin dipenuhi

Kewajiban pengungkapan laporan keuangan bagi perusahaan publik sendiri telah diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi

Emiten atau Perusahaan Publik Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (KNKG, 2006).

Tabel 1. *Item Pengungkapan Good Corporate Governance berdasarkan keputusan BAPEPAM No. KEP-134/BL/2006*

No	Indikator	Item Pengungkapan
1	Pemegang Saham	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai hak pemegang saham 2. Pernyataan mengenai jaminan perlindungan hak atas pemegang saham perlakuan yang setara terhadap semua pemegang saham 3. Tanggal pelaksanaan RUPS 4. Hasil RUPS
2	Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama anggota komisaris 2. Status setiap anggota (komisaris independen atau komisaris bukan independen) 3. Latar belakang pendidikan dan karier dewan komisaris 4. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab dewan komisaris 5. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota dewan komisaris 6. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tentang kinerja masing-masing anggota dewan komisaris 7. Jumlah rapat dilakukan 8. Jumlah kehadiran setiap anggota dewan komisaris dalam rapat 9. Mekanisme pengambilan keputusan 10. Program pelatihan dewan komisaris
3	Dewan Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama anggota direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing 2. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab direksi 3. Latar belakang pendidikan dan karier anggota direksi 4. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi. Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja direksi 5. Mekanisme pengambilan keputusan 6. Mekanisme pendelegasian wewenang 7. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota direksi 8. Jumlah rapat yang dilakukan oleh direksi 9. Jumlah kehadiran setiap anggota direksi dalam rapat 10. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja para anggota direksi 11. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi
4	Komite Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota komite audit 2. Riwayat hidup singkat anggota komite audit 3. Uraian tugas dan tanggung jawab komite audit 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit 5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit 7. Independensi anggota komite audit 8. Keberadaan piagam komite (<i>Commite Charter</i>)
5	Komite Nominasi dan Remunerasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota komite nominasi dan remunerasi 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota komite nominasi dan remunerasi 3. Uraian tugas dan tanggung jawab komite nominasi dan remunerasi 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite nominasi dan remunerasi 5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan remunerasi 7. Independensi anggota komite nominasi dan remunerasi
6	Komite Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota komite manajemen risiko 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota komite manajemen risiko 3. Uraian tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite manajemen risiko 5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite manajemen risiko 7. Independensi anggota komite manajemen risiko
7	Komite – komite yang dimiliki Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota komite 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota komite 3. Uraian tugas dan tanggung jawab komite 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite 5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite 7. Independensi anggota komite
8	Sekretaris Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Sekretaris Perusahaan 2. Riwayat singkat sekretaris perusahaan 3. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab sekretaris perusahaan

Pengembangan Hipotesis

a) Kualitas Audit

Penelitian yang dilakukan Mayangsari menyatakan bahwa spesialisasi industri audit mempunyai pengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan [8]. Laporan keuangan yang baik harus memenuhi prinsip *disclosure*

yakni salah satu komponen dari penerapan *good corporate governance* yang berkualitas pada perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Muhamad et.al. (2009) dalam Putranto (2013) status auditor tidak mempengaruhi kualitas pengungkapan isu *governance* dalam laporan tahunan perusahaan publik di Malaysia. Namun lain halnya dengan Hormati (2009) yang menemukan pengaruh kualitas auditor eksternal terhadap kualitas implementasi *good corporate governance* [11].

H₁ : Kualitas audit berpengaruh terhadap pengungkapan *good corporate governance*.

b) Kinerja Keuangan (Return In Equity)

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan rasio *return on equity* (ROE). Pemilihan rasio ini berdasarkan argumen bahwa adanya *corporate governance* dimaksudkan terutama untuk kepentingan pemegang saham (Jackson dan Carter (2005) dalam Kusumawati, 2006). Fokus kepada pemegang saham ini juga secara eksplisit dinyatakan dalam Pedoman Umum *Corporate Governance*, yaitu untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Pada praktiknya, peningkatan jumlah dan ragam pemangku harus disertai dengan pengungkapan informasi, khususnya informasi mengenai CG sebagai respon tanggung jawab atas penggunaan dana pemangku kepentingan oleh perusahaan. Laporan informasi CG yang memiliki kualitas yang tinggi, maka pemangku kepentingan (khususnya pemegang saham) akan semakin yakin dengan cara yang ditempuh oleh manajemen. Dengan demikian, kenaikan profitabilitas akan menyebabkan kecenderungan kenaikan tingkat pengungkapan laporan informasi *Corporate Governance*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan *good corporate governance*.

c) Ukuran Perusahaan (Size)

Menurut Hikmah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan *cooporate governance* [4]. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putranto menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *good corporate governance* [11]. Beberapa argumentasi yang mendukung hasil penelitian Noor Hikmah diantaranya pertama, perusahaan yang memiliki aset besar memiliki sumber daya untuk menghasilkan laporan yang lebih baik dan lebih banyak informasi yang diungkapkan. Kedua, biaya rata-rata untuk menghasilkan informasi lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki keterbatasan dalam informasi pelaporan. Ketiga, sorotan dan tekanan publik pada perusahaan besar akan mendorong pengungkapan informasi le[bih tinggi sebagai bentuk akuntabilitasnya. Hikmah [4]. Berdasarkan uraian

di atas maka hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah :

H₃ : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *good corporate governance*.

Metodelogi Penelitian

a) Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013, sedangkan sampel yang digunakan adalah perusahaan LQ45 yang memenuhi kriteria pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu suatu pengambilan sampel dimana peneliti menggunakan pertimbangan sendiri dengan maksud untuk memenuhi tujuan dari penelitian. Adapun kriteria yang dilakukan dalam pengambilan sampel berikut ini :

1. Perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 secara berturut-turut selama periode 2011-2013.
2. Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) Bahasa Indonesia secara berturut-turut dari tahun 2011-2013.
3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan dalam mata uang Rupiah selama periode tahun 2011-2013.
4. Perusahaan yang memiliki laba karena dianggap dapat menjaga tingkat profitabilitas sehingga dapat dilihat pengaruhnya terhadap pengungkapan dalam laporan keuangan.
5. Memiliki data lengkap terkait dengan variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan kriteria diatas, maka di dapatkan sampel sebanyak 21 perusahaan.

b) Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependent dan 3 variabel independen seperti di jelaskan di bawah ini :

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *good corporate governance* pada laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan *good corporate governance* dalam laporan tahunan ini diukur menggunakan indeks pengungkapan *good corporate governance*, hal ini berdasarkan penelitian dari Rini (2010) dalam Putranto [11]. Metode yang dapat digunakan dalam mengukur indeks pengungkapan ini yaitu metode proporsi dengan membandingkan total skor *item* yang diungkapkan perusahaan. Indeks pengungkapan *good corporate governance* pada laporan tahunan dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$IPGCG = \frac{\text{Total Skor Item yang diungkapkan Perusahaan}}{\text{Skor Maksimal yang seharusnya diungkapkan perusahaan}} \dots\dots\dots (11)$$

2. Variabel Independen

Kualitas Audit (KA)

Kualitas audit adalah hasil auditing yang dilakukan auditor eksternal yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan kekeliruan atau kecurangan. Kualitas audit diproksikan dengan ukuran KAP yaitu KAP Big 4 yang diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP big 4 dan 0 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP non big 4 (Hormati, 2009). KAP Big 4 terdiri dari :

- 1) *Deloitte Touche Tohmatsu* – KAP Osman Bing Satrio
- 2) *Pricewaterhouse Coopers (PWC)* – KAP Haryanto Sahari
- 3) *Ernst & Young* – KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja
- 4) *Klynveldt Peat Marwick Goerdeler (KPMG)* – KAP Sidharta, Sidharta, Widjaja

Kinerja Keuangan (Return on Equity)

Dalam mengukur kinerja perusahaan, investor biasanya melihat kinerja keuangan yang tercermin dari profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan variabel *Return On Equity (ROE)*. *Return on equity* adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (*net worth*) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. Perhitungan ROE secara umum dihasilkan dari pembagian laba bersih dengan total ekuitas Putranto [11].

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \dots\dots\dots (11)$$

Ukuran Perusahaan (SIZE)

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan diukur melalui total aset yang dimiliki perusahaan. Total aset ini sendiri menggambarkan kekayaan yang dimiliki perusahaan tersebut. Sebagai proksi dari ukuran perusahaan (*size*), umumnya studi-studi yang meneliti hubungan antara *size* dengan profitabilitas perusahaan menggunakan logaritma natural dari total aset, hal ini digunakan untuk mengurangi perbedaan signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil, maka nilai total aset dibentuk menjadi logaritma natural. Konversi kebentuk logaritma natural ini bertujuan untuk membuat data total aset terdistribusi normal. Untuk mendapatkan nilai

logaritma natural menggunakan function di excel = Ln (kolom A atau total asset) akan ditemukan nilai Ln size. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan log natural dari total asset (Klapper dan Love, 2002 dalam Natalia [10])

$$\boxed{\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Aset}} \dots\dots\dots (10)$$

2. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda (*multiple linear regression*). Teknik analisis ini bertujuan untuk mengukur pengaruh antara kualitas audit, kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *good corporate governance*. Model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap pengungkapan *good corporate governance* dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$IPGCG = \alpha + \beta_1KA + \beta_2ROE + \beta_3SIZE + \varepsilon \dots (7)$$

Keterangan:

IPGCG : indeks pengungkapan *good corporate governance*

α : konstanta

$\beta_1 - \beta_3$: koefisien regresi dari variabel independen

KA : kualitas Audit

ROE : *profitabilitas*

SIZE : ukuran Perusahaan

ε : *error term*

Uji Normalitas

Hasil Pengujian *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa angka signifikansi uji *kolmogorov-smirnov Asymp.Sig (2-Tailed)* nilainya sebesar 0,619 dengan taraf signifikan 0,05 terlihat bahwa angka signifikan lebih besar dari taraf signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki *Tolerance* yang lebih dari 0,1 dan nilai VIF yang menunjukkan nilai yang kurang dari 10. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas dalam model regresi.

Uji Heterokedastisitas

Hasil pengujian heterokedastisitas menggunakan uji *glejser* Menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi > 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini terbebas dari masalah heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Hasil pengujian Autokorelasi menggunakan nilai *durbin watson* (dw) dalam analisis diperoleh sebesar 1,718, lalu akan dibandingkan dengan nilai dl dan du yang diperoleh dari tabel *durbin watson*. Untuk jumlah sampel sebanyak

(n) = 63 dengan k = 3 (k adalah jumlah variabel independen), maka diperoleh nilai dl sebesar 1,4943 dan du sebesar 1,6932. Karena nilai dw 1,718 > 1,6932 du dan berada dibawah < 4-du (4-1,6932 = 2,3068). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinansi (Uji R²)

Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,540	0,291	0,225	0,1231649

Berdasarkan tabel 4.1 nilai dari R² sebesar 0,291 yang berarti bahwa sebesar 29% pengungkapan *good corporate governance* dipengaruhi oleh variabel kualitas audit, kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 71% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Anova (Uji F)

Hasil pengujian simultan diperoleh sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Uji F atau Uji Anova

Variabel 1 Dependent : IPGCG F tabel: 2,76				
Model	Df	Sum of suare	F	Sig
Regression	3	0,368	8,080	0,000

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dari hasil uji F, nilai F_{hitung} sebesar 8,080 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti F_{hitung} > F_{tabel} yaitu, 8,080 > 2,76 dan nilai signifikansi probabilitas < 0,05 . Hal ini membuktikan bahwa model regresi dalam penelitian ini signifikan maka model bisa digunakan untuk prediksi/peramalan.

Uji Parsial (Uji t)

Untuk menjawab hasil dari hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji signifikansi parsial (Uji t) untuk melihat pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Uji t

t table : 2,003			
Variabel	t hitung	Signifikansi	Hasil
KA	-0,549	0,585	H ₁ ditolak
ROE	0,284	0,777	H ₂ ditolak
SIZE	4,909	0,000	H ₃ diterima

Variabel KA (Kualitas Audit) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,549 dan nilai signifikansi sebesar 0,585. Hal ini berarti nilai t_{hitung} < t_{tabel}, yaitu -0,549 < 2,003 dan nilai signifikansi 0,585 > 0,05. Dengan demikian H₁ ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *good corporate governance*.

Variabel ROE (Kinerja Keuangan) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,284 dan nilai signifikansi sebesar 0,777. Hal ini

berarti nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $0,284 < 2,003$ dan nilai signifikansi $0,777 > 0,05$. Dengan demikian H_2 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *good corporate governance*.

Variabel SIZE (Ukuran Perusahaan) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,909 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $4,909 > 2,003$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *good corporate governance*.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas. Adapun hasil pengolahan data sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda

	Beta	T	Sig.
Konstanta	-1,102	-3,076	0,003
KA	-0,33	-0,549	0,585
ROE	0,76	0,284	0,777
SIZE	0,56	4,909	0,000

Model persamaan regresi linier berganda dan analisis yang diperoleh adalah :

$$IPGCG = \alpha + \beta_1KA + \beta_2ROE + \beta_3SIZE + \epsilon$$

$$IPGCG = -1,102 + (-0,33) + 0,76 + 0,56 + \epsilon$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa indeks kelengkapan pengungkapan dipengaruhi oleh KA, ROE, dan SIZE

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Good Corporate Governance.

Hasil pengujian secara statistik hipotesis ditolak. Hal ini membuktikan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *good corporate governance*. Tidak terdapatnya pengaruh kualitas audit terhadap pengungkapan *good corporate governance* menunjukkan teori reputasi belum sepenuhnya dapat memprediksikan bahwa ukuran KAP yang besar (KAP Big 4) akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas. Menurut Mayangsari (2003) dalam Hormati [15] spesialisasi industri auditor mempunyai pengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Laporan keuangan yang informatif dan memenuhi prinsip "disclosure" adalah salah satu komponen dari penerapan *good corporate governance* yang berkualitas pada sebuah perusahaan. Namun dalam penelitian ini menunjukkan KAP Big 4 belum bisa mengendalikan atau menekan manajemen perusahaan untuk menerapkan *Good Corporate Governance*.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Hormati yang menemukan pengaruh kualitas audit terhadap

penerapan *good corporate governance* [5]. Namun hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putranto yang menunjukkan bahwa variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *good corporate governance*. Hasil penelitiannya berarah negatif menunjukkan ada kecenderungan bahwa semakin rendah tingkat kualitas audit menunjukkan semakin rendah keahlian auditor (spesialisasi) maka semakin rendah pula luas pengungkapan *good corporate governance* [11].

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Good Corporate Governance.

Hasil pengujian secara statistik hipotesis ditolak. Hal ini membuktikan bahwa kinerja keuangan yang dinilai dengan *Return On Equity* (ROE) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *good corporate governance*. Tidak terdapatnya pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan *good corporate governance* hal ini disebabkan karena profitabilitas yang merupakan proksi kinerja keuangan adalah cermin dari kinerja perusahaan yang merupakan keharusan demi mempermudah kelancaran operasional sehari-hari. Selain itu menurut Kusumawati menyebutkan bahwa pengungkapan diduga dapat mengurangi *cost of capital* melalui pengurangan biaya pengumpulan informasi yang dilakukan investor [6]. Pengurangan biaya dapat meningkatkan keinginan investor untuk berinvestasi di perusahaan. Jika pengungkapan dilihat dalam sudut pandang ini, maka kinerja perusahaan termasuk profitabilitas akan tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan.

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Natalia yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *good corporate governance*. Hasil penelitiannya menunjukkan Profitabilitas memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap pengungkapan CG dalam laporan tahunan. Hal ini dikarenakan ketika perusahaan mengalami penurunan profitabilitas, perusahaan akan cenderung memberikan informasi lebih tentang pengungkapan CG untuk menghadapi tekanan pasar dan meyakinkan pasar akan kinerja perusahaan pada periode mendatang [10].

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Good Corporate Governance.

Hasil pengujian secara statistik hipotesis diterima. Hal ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *good corporate governance*. Dalam penelitian ini variabel ukuran perusahaan dinilai dengan total aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang baik untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik pula serta lebih banyak informasi yang diungkapkan. Selain itu, perusahaan besar menjadi entitas yang banyak disorot pasar maupun publik sehingga mereka akan lebih banyak mengungkapkan informasi sebagai bentuk akuntabilitasnya dan pengurangan biaya agensi. Sehingga dapat disimpulkan semakin besar ukuran perusahaan maka

semakin tinggi pengungkapannya. Sebaliknya, semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin rendah pula pengungkapannya.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian oleh Natalia (2012) dan Putranto yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *good corporate governance*. Hal ini disebabkan keputusan mengenai luas pengungkapan maupun *item-item* pengungkapan apa saja yang akan diungkapkan perusahaan lebih didasarkan pada pertimbangan strategis manajemen, bukan karena semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut [11]. Namun hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hikmah yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *good corporate governance*. Menurutnya perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dalam upaya mengurangi biaya keagenan [4].

3. Kesimpulan

1. Variabel kualitas audit (KA) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *good corporate governance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa KAP big 4 belum tentu mengungkapkan *corporate governance* lebih luas.
2. Variabel kinerja keuangan (ROE) juga tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *good corporate governance*. Kinerja keuangan yang dicapai bukan menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengungkapkan penerapan tata kelola perusahaannya. Tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing yang menganggap pentingnya penerapan *good corporate governance* dari kacamata *stakeholders*.
3. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh terhadap pengungkapan *good corporate governance*. Hal ini berarti, ukuran perusahaan yang dinilai dengan total aset dapat mencerminkan pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Perusahaan yang besar lebih banyak mengungkapkan tentang pelaksanaan *good corporate governance* perusahaannya dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini menunjukkan regulasi yang mengatur pengungkapan *good corporate governance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI belum dapat dipatuhi seluruh emiten dan kurangnya tingkat kesadaran akan pentingnya penerapan *good corporate governance* sebagai wujud akuntabilitas terhadap *stakeholders*.

Saran

1. Untuk memperoleh penelitian yang lebih baik sebaiknya penelitian berikutnya memperluas sampel penelitian dan pengujian pengamatan yang lebih lama sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.
2. Peneliti selanjutnya hendaknya dapat menambahkan variabel lain yang dapat berperan dalam mempengaruhi kelengkapan pengungkapan *good corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan.

3. Penilaian indeks pengungkapan *corporate governance* dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa peneliti sehingga dapat memperkecil tingkat subjektivitas penilaian indeks pengungkapan *corporate governance*.
4. BAPEPAM perlu mengontrol laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan (emiten) agar perusahaan dapat memberikan pengungkapan yang lebih lengkap sehingga akan member manfaat bagi para pemakainya.

Daftar Pustaka

- [1] Chariri, Anis dan Imam Ghozali. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang. Badan Penerbit UNDIP.
- [2] Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Edisi 1. Salemba Empat. Jakarta.
- [3] Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- [4] Hikmah, Noor dan D. Rahmayanti. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Corporate Governance Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI*. Simposium Nasional Akuntansi XIV.
- [5] Hormati, Asrudin 2009. *Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol 13. No. 2, Mei 2009. Hal. 288-298.
- [6] Kusumawati, Dwi Novi. 2007. *Profitability and Corporate Governance Disclosure: An Indonesia Study*. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 10, No. 2. Hal. 131-146.
- [7] Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance*. Jakarta: KNKG.
- [8] Mayangsari. 2003. *Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan*. Simposium Nasional Akuntansi IV. Surabaya.
- [9] Moeljono, Djokosantoso. 2005. *Good Corporate Governance Sebagai Inti Good Corporate Culture*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- [10] Natalia, Petri. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Governance Dalam Laporan Tahunan*. Diponegoro Journal of Accounting, Vol 1. No. 2. Hal. 1-10.
- [11] Putranto, Rianto Jati. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Corporate Governance Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2011*. Diponegoro Journal of Accounting, Vol 2. No. 2 . Hal. 1-12.
- [12] Rini, Amilia Kartika. 2010. *Analisis Luas Pengungkapan Corporate Governance Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- [13] Sutiyo, Bambang, 2008. *Prinsip GCG Bagi Dunia Usaha Dalam Mewujudkan Tata Kelola Usaha Yang*

Beretika Dan Berkelanjutan. Didownload dari <http://bambang.staff.uii.ac.id/2008/10/20/prinsip-gcg-bagi-dunia-usaha-dalam-mewujudkan-tata-kelola-usaha-yang-beretika-dan-berkelanjutan/> pada tanggal 27 November 2011.